

**ANALISIS TINGKAT KETERGANTUNGAN, KEMANDIRIAN, DAN
DESENTRALISASI KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Yang Mengalami Peningkatan Pariwisata
Pada Tahun 2017-2021)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

CINDY MULIA ANDELTA

2019/19133017

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS TINGKAT KETERGANTUNGAN, KEMANDIRIAN, DAN
DESENTRALISASI KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada
Kabupaten/Kota Yang Mengalami Peningkatan Pariwisata Pada Tahun 2017-
2021)**

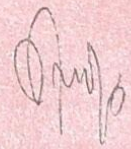
Nama : Cindy Mulia Andelta
NIM : 19133017
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, 30 Agustus 2022

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi


Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP.19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh,
Pembimbing


Nurzi Sebrina, SE, M.Sc. Ak
NIP. 19720910 199802 2 003

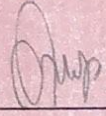

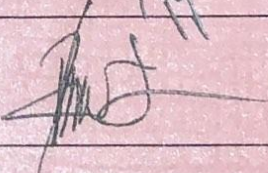
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS TINGKAT KETERGANTUNGAN, KEMANDIRIAN, DAN DESENTRALISASI KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Yang Mengalami Peningkatan Pariwisata Pada Tahun 2017- 2021)

Nama : Cindy Mulia Andelta
NIM : 19133017
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 30 Agustus 2022

		Tim Penguji	
Nama			Tanda Tangan
1. Nurzi Sebrina, SE, M.Sc. Ak	(Ketua)		
2. Vita Fitria Sari, SE, M.Si	(Anggota)		
3. Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc	(Anggota)		

ABSTRAK

Cindy Mulia Andelta : **Analisis Tingkat Ketergantungan, Kemandirian, dan Desentralisasi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Yang Mengalami Peningkatan Pariwisata Pada Tahun 2017-2021)**

Pembimbing : **Nurzi Sebrina, SE, M. Sc, Ak**

Dalam suatu pemerintahan daerah diperlukan adanya laporan keuangan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja keuangan suatu pemerintahan daerah dalam satu periode yang digunakan sebagai informasi keuangan dan transaksi yang terjadi dalam pemerintah daerah tersebut. Untuk menilai kinerja keuangan daerah dan memudahkan dalam memahami laporan keuangan, maka diperlukan sebuah analisis laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketergantungan, kemandirian, dan desentralisasi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi yang mengalami peningkatan kunjungan pariwisata yang tentunya berpengaruh terhadap pendapatan daerah tersebut pada tahun 2017-2021 dengan menggunakan analisis rasio ketergantungan keuangan daerah, analisis rasio kemandirian keuangan daerah, dan analisis rasio derajat desentralisasi keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran lima kabupaten/kota tersebut yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima kabupaten/kota tersebut dari tahun 2017-2021 masih sangat rendah dan masih sangat bergantung terhadap bantuan pemerintah pusat (eksternal), meskipun mengalami peningkatan jumlah pengunjung di bidang pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis ketergantungan, kemandirian, dan derajat desentralisasi keuangan daerah yang menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir.

Kata kunci : laporan keuangan, kinerja keuangan daerah, analisis rasio.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“ANALISIS TINGKAT KETERGANTUNGAN, KEMANDIRIAN, DAN DESENTRALISASI KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Yang Mengalami Peningkatan Pariwisata Pada Tahun 2017-2021)”** tepat pada waktunya. Serta shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad ﷺ yang telah membawa kita dari dunia yang penuh dengan kejahiliahan ke dunia yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan mahasiswa untuk mencapai gelar Ahli Madya Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Negeri Padang. Selesainya penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan ridho dan kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi.
2. Kedua orang tua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis bisa sampai dititik ini.
3. Dekan dan pembantu dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Halkadri, SE.,MM.Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang sekaligus dosen pembimbing akademik penulis.
5. Ibu Nurzi Sebrina,SE ,M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si dan Ibu Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc selaku dosen penguji tugas akhir penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan untuk penulis memaparkan tugas akhir ini.
7. Kepada sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum bisa disebut sempurna karena masih banyak kekurangannya, maka dari itu penulis harapkan saran dan kritik dari para pembaca agar bisa membangun dan menyempurnakan tugas akhir ini. Penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya, penulis harap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terima kasih.

Padang, Agustus 2022

Cindy Mulia Andelta

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Otonomi Daerah.....	18
B. Keuangan Daerah.....	19
C. Laporan Keuangan	20
D. Kinerja Keuangan.....	26
E. Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	28
1. Analisis Rasio Ketergantungan	30
2. Analisis Rasio Kemandirian.....	31
3. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi.....	33
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	35
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
1. Lokasi Penelitian	35
2. Waktu Penelitian	35
C. Rancangan Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36

2. Tahapan Penelitian	36
3. Objek Penelitian	37
4. Sumber Data Penelitian	37
5. Teknik Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Profil Pemerintah Daerah.....	40
1. Kabupaten Solok	40
2. Kabupaten Sijunjung	42
3. Kabupaten Lima Puluh Kota	44
4. Kabupaten Dharmasraya	46
5. Kota Bukittinggi.....	48
B. Pembahasan.....	50
1. Analisis Ketergantungan	50
2. Analisis Kemandirian	58
3. Analisis Derajat Desentralisasi.....	66
4. Pembahasan	74
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Keterbatasan Penelitian	80
C. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kunjungan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Orang) Tahun 2017-2021	9
Tabel 1.2 Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Yang Mengalami Peningkatan Pariwisata Tahun Anggaran 2017-2021	10
Tabel 1.3 Total Pendapatan Daerah Pemerintah Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Dharmasraya, Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017-2021 (dalam miliar rupiah).....	11
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah.....	30
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah.....	32
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah	34
Tabel 4.1 Analisis Rasio Ketergantungan Tahun Anggaran 2017-2021 (dalam miliar rupiah).....	51
Tabel 4.2 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017-2021 (dalam juta rupiah).....	59
Tabel 4.3 Analisis Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017-2021 (dalam miliar rupiah).....	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017-2021	52
Grafik 4.2	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2017-2021	53
Grafik 4.3	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017-2021	55
Grafik 4.4	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017-2021	56
Grafik 4.5	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017-2021	57
Grafik 4.6	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017-2021	60
Grafik 4.7	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2017-2021	61
Grafik 4.8	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017-2021	63
Grafik 4.9	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya Tahun Anggaran 2017-2021	64
Grafik 4.10	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017-2021	65
Grafik 4.11	Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah Kab. Solok Tahun Anggaran 2017-2021	68
Grafik 4.12	Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah Kab. Sijunjung Tahun Anggaran 2017-2021	69
Grafik 4.13	Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017-2021	71
Grafik 4.14	Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya Tahun Anggaran 2017-2021	72
Grafik 4.15	Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017-2021	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, perangkat daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah yaitu memberikan tanggung jawab kepada setiap pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kepentingan pemerintahannya sendiri termasuk keuangan daerahnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerahnya dengan tetap mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah diminta untuk dapat melakukan kewajibannya secara baik dan transparan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan otonomi tersebut. Pertama, pengelolaan keuangan daerah

dan anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Kedua, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan birokrasi yang sehat dan memiliki wawasan dan jiwa wirausaha. Ketiga, prinsip kepatutan dalam pemerintahan yang tidak terlepas dari kewajiban etika dan moral serta budaya baik antara pemerintah dengan rakyat, antara lembaga/pejabat pemerintahan dengan pihak ketiga. Keempat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga Pemerintah Daerah mendapat petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat (Amin, I. D., 2013:42).

Keuangan daerah adalah segala sesuatu yang bernilai uang dan komoditi yang dijadikan kekayaan dan menjadi milik daerah yang dihasilkan dari pengelolaan hak dan kewajiban daerah oleh pemerintah daerah tersebut. Setiap pemerintah daerah wajib melaporkan perkembangan keuangan daerahnya setiap tahun kepada pemerintah pusat melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Sujarweni, 2015:107). Mardiasmo (2002:121) menjelaskan bahwa, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan

untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Menurut Hendro Sumarjo (dalam Fathah, R. N. 2017), Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Untuk melihat bagaimana pemerintah daerah menjalankan otonomi daerahnya dapat diukur dari kinerja keuangan daerahnya. Untuk mengukur kinerja diperlukan beberapa indikator yang perlu digunakan. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci (Sujarweni, 2015).

Menurut Sujarweni (2015:108), elemen pokok yang digunakan dalam pengukuran sistem kinerja adalah sebagai berikut: 1) menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi sektor publik, 2) merumuskan indikator dan ukuran kinerja, 3) mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi, 4) evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas).

Untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan melakukan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Ada beberapa analisis rasio yang bisa digunakan yaitu : Analisis pertumbuhan keuangan daerah,

analisis varians anggaran keuangan daerah, analisis rasio efektivitas keuangan daerah, analisis rasio efisiensi keuangan daerah, analisis kontribusi keuangan daerah, analisis derajat desentralisasi keuangan daerah, analisis rasio ketergantungan keuangan daerah, analisis rasio kemandirian keuangan daerah, analisis derajat kontribusi BUMD, analisis *debt service coverage ratio* (DSCR), dan analisis *debt service ratio*.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga analisis rasio, yaitu analisis rasio ketergantungan keuangan daerah, analisis rasio kemandirian keuangan daerah, dan analisis derajat desentralisasi. Analisis tersebut digunakan untuk mengukur seberapa mandiri dan tergantung sebuah daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya untuk pembangunan, kegiatan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan seberapa besar pemerintah pusat dapat mempercayai dan memberikan tanggung jawab pemerintahan kepada sebuah daerah.

Ketergantungan keuangan daerah yaitu menunjukkan apakah suatu daerah mampu membiayai aktivitas pembangunan daerahnya melalui optimalisasi PAD tanpa terlalu bergantung dengan pemerintah pusat. Mengukur tingkat ketergantungan Keuangan daerah dapat menggunakan analisis rasio ketergantungan keuangan daerah, yaitu membandingkan seluruh jumlah pendapatan transfer dengan jumlah pendapatan total pendapatan daerah. Analisis rasio ketergantungan keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik

yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya (Wahyuni, 2020). Apabila analisis rasio ketergantungan semakin tinggi, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah/provinsi terhadap pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Wahyuni, 2020). Halim (2012) menjelaskan bahwa, Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dapat menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer dan pinjaman. Menurut Widodo (2000) rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan Pemerintah Pusat atau pinjaman. Apabila analisis rasio kemandirian keuangan

daerah semakin tinggi, maka semakin rendah ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat atau pihak ekstern.

Derajat desentralisasi yaitu menunjukkan seberapa besar pemerintah pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam pembangunan suatu daerah dan seberapa besar kesiapan pemerintah daerahnya dalam menjalankan otonomi daerah. Wahab et al (2017) menjelaskan bahwa, tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Derajat desentralisasi dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio derajat desentralisasi, yaitu membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan total daerah. Rasio Desentralisasi Fiskal juga merupakan rasio untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan (Wahab, dkk. 2017). Apabila analisis rasio desentralisasi semakin besar, maka semakin tinggi kemampuan keuangan dalam mendukung otonomi daerah.

Salah satu sektor pendukung sumber pendapatan di Sumatera Barat adalah pariwisata. Dengan meningkatnya industri di bidang pariwisata maka akan membawa pengaruh pada berbagai macam sumber pendapatan daerah. Pendapatan sektor pariwisata merupakan bagian dari PAD yang berasal dari kegiatan pariwisata yang di dalamnya terdapat retribusi dan pajak seperti hotel, restoran, dan yang lainnya (Udayantini et al., 2015). Selain itu, sektor

pariwisata dapat meningkatkan peningkatan pendapatan masyarakat nasional, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, hal ini bisa menjadi alasan pembangun sektor pariwisata juga bisa dikatakan sebagai produk alternatif penghasil bagi negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dan dijelaskan juga bahwa, Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Komponen-komponen yang mendukung sebuah objek wisata adalah seperti perhotelan, angkutan, restoran, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber PAD dari industri pariwisata adalah melalui retribusi dan pajak.

Sumatera Barat memiliki banyak sekali potensi kekayaan alam yang sangat indah, unik, dan menarik sehingga banyak tempat yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, pendorong ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan dapat membuka lowongan kerja bagi masyarakat. Sumatera Barat tidak memiliki potensi yang besar dari sumber pendapatan yang berasal dari sumber daya alamnya. Dalam meningkatkan pariwisata pemerintah juga telah

menyiapkan berbagai rencana strategi seperti pengembangan destinasi yang telah ada, pengembangan destinasi baru, dan wisata minat khusus. Misalnya pengembangan destinasi baru seperti Bukik Chinangkiek di Kab. Solok, yaitu taman hiburan keluarga yang memiliki berbagai macam wahana yang menarik minat wisatawan dan danau talang yang saat ini sedang menjadi pembicaraan karena keasriannya sehingga sangat cocok dijadikan tempat *camping* bersama keluarga dan teman-teman. *Alinia Farm and Park* di Kabupaten Dharmasraya, yaitu objek wisata yang memberikan suasana ala korea dengan perpaduan khas pedesaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengambil beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan dibidang pariwisata untuk menganalisis tingkat ketergantungan, kemandirian, dan desentralisasi keuangan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah wilayah Sumatera Barat masih relatif kecil sehingga pendapatan daerah di wilayah Sumatera Barat masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Hal ini dari kontribusi pendapatan transfer terhadap total realisasi pendapatan daerah lebih tinggi daripada PAD. Berbagai strategi telah disiapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan PAD seperti yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat bahwa pada 2021-2026 Sumatera Barat akan fokus pada bidang pertanian secara luas, pariwisata dan pendidikan karena tahun ini Sumatera Barat telah mendapat dukungan dari Kementerian Investasi untuk sektor tersebut. Berikut ini tabel kunjungan wisatawan, pendapatan pajak dan retribusi daerah, dan pendapatan

daerah Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi tahun 2017-2021 :

Tabel 1.1

Kunjungan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Barat (Orang) Tahun 2017-2021

Pemerintah Daerah	Kab. Solok	% Pertumbuhan	Kab. Sijunjung	% Pertumbuhan	Kab. Lima Puluh Kota	% Pertumbuhan	Kab. Dharmasraya	% Pertumbuhan	Kota Bukittinggi	% Pertumbuhan
2017	270.784		5.734		166.710		427		478.400	
2018	310.077	14,51%	7.187	25,34%	251.053	50,59%	1.350	216,16%	547.976	14,54%
2019	601.244	93,90%	12.434	73,01%	639.840	154,86%	9.745	621,85%	933.609	70,37%
2020	703.649	17,03%	149.889	1.105,48%	654.334	2,27%	11.676	19,82%	1.471.542	57,62%
2021	703.300	-0,05%	60.533	-59,61%	624.155	-4,61%	54.908	370,26%	748.074	-49,16%
Rerata Pertumbuhan		31,35%		286,05%		50,78%		307,02%		23,34%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (data diolah, 2022)

Tabel 1.2
Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Yang Mengalami
Peningkatan Pariwisata
Tahun Anggaran 2017-2021

Jenis Pajak & Retribusi	Tahun	Kab. Solok	Kab. Sijunjung	Kab. Lima Puluh Kota	Kab. Dharmasraya	Kota Bukittinggi
Pajak Hotel	2017	12.105.001,00	173.052.680,00	23.428.000,00	152.949.250,00	12.648.113.302,00
	2018	11.266.364,00	170.088.423,00	22.538.300,00	289.606.350,00	13.819.121.537,00
	2019	7.511.363,00	143.020.100,00	31.936.000,00	197.117.450,00	14.451.392.563,00
	2020	3.159.091,00	176.755.506,00	17.181.500,00	75.169.750,00	7.995.854.765,00
	2021	2.000.000,00	159.660.122,00	30.841.000,00	113.415.750,00	12.296.289.161,00
	Rata-rata	7.208.363,80	164.515.366,20	25.184.960,00	165.651.710,00	12.242.154.265,60
Pajak Restoran	2017	1.445.504.523,00	1.759.524.003,00	885.977.950,00	1.446.913.096,70	4.883.019.955,00
	2018	1.495.667.687,00	1.859.530.381,00	912.892.889,00	1.706.760.985,86	6.040.839.165,00
	2019	1.587.767.518,00	2.104.537.724,00	1.190.118.502,00	1.894.628.432,00	6.883.406.364,00
	2020	1.276.425.010,00	1.422.957.891,00	940.778.989,00	1.364.845.743,45	5.494.925.670,00
	2021	1.494.693.234,00	1.490.928.113,00	1.308.485.117,00	1.322.388.104,00	6.052.919.004,00
	Rata-rata	1.460.011.594,40	1.727.495.622,40	1.047.650.689,40	1.547.107.272,40	5.871.022.031,60
Pajak Hiburan	2017	1.816.500,00	-	21.114.000,00	22.051.500,00	839.947.541,00
	2018	-	200.000,00	6.900.000,00	9.450.000,00	957.503.292,00
	2019	244.500,00	-	21.400.000,00	7.975.000,00	1.059.475.533,00
	2020	-	1.250.000,00	93.500.000,00	198.347.740,00	497.643.625,00
	2021	-	-	152.150.000,00	281.958.792,00	712.031.108,00
	Rata-rata	412.200,00	290.000,00	59.012.800,00	103.956.606,40	813.320.219,80
Retribusi Pariwisata	2017	175.724.000,00	25.089.000,00	990.931.000,00	-	17.014.812.182,00
	2018	189.500.000,00	96.150.000,00	1.649.673.000,00	9.864.100,00	17.687.545.621,00
	2019	205.714.000,00	80.113.000,00	1.743.779.500,00	24.700.200,00	16.472.382.082,00
	2020	84.675.000,00	53.896.000,00	1.667.467.000,00	33.829.195,00	11.592.027.957,00
	2021	119.147.000,00	86.730.000,00	1.157.908.000,00	18.622.495,00	17.551.935.684,00
	Rata-rata	154.952.000,00	68.395.600,00	1.441.951.700,00	17.403.198,00	16.063.740.705,20

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (data diolah, 2022)

Tabel 1.3

**Total Pendapatan Daerah Pemerintah Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Lima
Puluh Kota, Kab. Dharmasraya, Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2017-2021 (dalam miliar rupiah)**

Pemerintah Daerah	Tahun	Total Pendapatan Daerah	%Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah	Realisasi PAD	%Pertumbuhan Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan Transfer	%Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Transfer	Pendapatan Lain-Lain Yang Sah	%Pertumbuhan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah
Kab. Solok	2017	1.145		113		1.021		10	
	2018	1.164	1,66%	68	-39,70%	1.042	2,02%	53	428,27%
	2019	1.255	7,83%	75	9,22%	1.116	7,10%	64	20,30%
	2020	1.139	-9,21%	71	-5,39%	1.006	-9,82%	62	-3,10%
	2021	1.216	6,77%	76	7,49%	1.084	7,72%	56	-9,37%
Rerata Pertumbuhan			1,76%		-7,10%		1,76%		109,03%
Kab. Sijunjung	2017	976		108		847		21	
	2018	942	-3,52%	79	-26,74%	823	-2,83%	40	87,20%
	2019	998	5,95%	84	6,14%	875	6,39%	38	-3,67%
	2020	942	-5,60%	92	10,21%	809	-7,58%	40	5,12%
	2021	971	3,05%	92	-0,76%	838	3,61%	40	0,64%
Rerata Pertumbuhan			-0,03%		-2,79%		-0,10%		22,32%
Kab. Lima Puluh Kota	2017	1.276		120		1.155		1	
	2018	1.257	-1,47%	73	-38,68%	1.181	2,24%	3	130,25%
	2019	1.336	6,31%	85	15,97%	1.242	5,17%	10	217,18%
	2020	1.209	-9,50%	77	-9,09%	1.122	-9,66%	10	7,17%
	2021	1.261	4,24%	80	3,13%	1.164	3,79%	17	62,21%
Rerata Pertumbuhan			-0,10%		-7,17%		0,38%		104,20%
Kab. Dharmasraya	2017	949		99		832		18	
	2018	924	-2,69%	84	-14,98%	808	-2,83%	31	71,19%
	2019	1.019	10,37%	79	-6,22%	907	12,16%	34	8,85%
	2020	990	-2,86%	83	5,06%	872	-3,79%	35	3,52%
	2021	979	-1,14%	83	-0,06%	839	-3,87%	57	64,63%
Rerata Pertumbuhan			0,92%		-4,05%		0,42%		37,05%
Kota Bukittinggi	2017	653		102		551		0	
	2018	696	6,46%	102	-0,43%	579	5,07%	15	-

	2019	734	5,54%	112	9,77%	607	4,89%	15	1,65%
	2020	689	-6,11%	84	-24,85%	585	-3,65%	20	33,77%
	2021	689	-0,09%	92	9,16%	594	1,48%	3	-84,60%
	Rerata Pertumbuhan		1,45%		-1,59%		1,95%		-16,39%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (data diolah, 2022)

Dalam penelitian ini ada lima kabupaten/kota yang diteliti, yaitu Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi. Kabupaten/kota tersebut dipilih karena dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat lima kabupaten/kota ini pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan dalam jumlah pengunjung (wisatawan) yang tentunya berpengaruh terhadap pendapatan daerah tersebut, meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan karena pandemi covid-19 yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan adanya pembatasan sosial sehingga berdampak terhadap jumlah pengunjung atau wisatawan pada tahun 2021 tersebut. Dapat dilihat dari tabel 1.1 kunjungan wisatawan di atas bahwa Kab. Dharmasraya memiliki rerata pertumbuhan wisatawan paling tinggi dengan 307,02%, dan Kota Bukittinggi memiliki rerata pertumbuhan wisatawan paling rendah diantara empat kabupaten lainnya dengan 23,34%.

Kabupaten/kota tersebut memiliki keindahan alam yang unik dan menarik untuk dikunjungi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Contohnya seperti Danau Singkarak, Bukik Chinangkiek, dan Danau Kembar, Silokek, Sungai Pasir Putih, Danau Hijau, Lembah Harau, Kapalo

Banda, Padang Mangateh, Bukit Tambun, Candi Padang Roco, Gunung Tujuh, Jam Gadang, Ngarai Sianok, Lobang Jepang, dll. Begitu banyak keindahan alam di kabupaten/kota tersebut yang dapat membantu kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pendapatan pajak dan retribusi yang bersumber dari sektor pariwisata belum tampak kestabilannya meskipun wisatawan yang datang meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwasanya Kota Bukittinggi memiliki tingkat rata-rata tertinggi pendapatan pajak dan retribusi di bidang pariwisata seiring dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi.

Berdasarkan tabel pendapatan daerah di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan di setiap kabupaten/kota tersebut fluktuatif atau mengalami perubahan setiap tahunnya meskipun mengalami peningkatan wisatawan. Peningkatan pendapatan daerah tertinggi pada lima kabupaten/kota di atas terjadi pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan karena pandemi covid-19 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan pembiayaan terhadap penanganan covid-19 memakan biaya yang tidak terduga dan berdampak pada dana bantuan dari pemerintah pusat ke setiap pemerintah daerah yang turun pada tahun 2020.

Dari lima kabupaten/kota yang menjadi sampel, tidak ada satupun yang mengalami kenaikan pendapatan daerah yang konstan. Rerata pertumbuhan total pendapatan daerah tahun 2017-2021 tertinggi dimiliki oleh Kab. Solok sebesar 1,76%, dan rerata pertumbuhan total pendapatan

daerah yang paling rendah dimiliki Kab. Lima Puluh Kota sebesar 0,10%. Pendapatan daerah dari bidang pariwisata hanya memberikan kontribusi di bidang retribusi dan pajak, yang mana artinya penyebab pendapatan daerah di lima kabupaten/kota di atas fluktuatif adalah karena sumber pendapatan daerah lainnya. Namun, perubahan tersebut belum menjelaskan bagaimana tingkat ketergantungan, kemandirian, dan desentralisasi keuangan daerah kabupaten/kota tersebut. Apakah tingkat ketergantungan, kemandirian, dan desentralisasinya mengalami peningkatan atau penurunan dan dapat dikategorikan ke dalam rendah, sedang, atau tinggi keuangan daerah tersebut pada setiap analisisnya.

Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk pemerintah daerah karena dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah selanjutnya. Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi pendapatan atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mokodompit, dkk., 2014:1522). Analisis rasio keuangan daerah dengan menggunakan rasio ketergantungan, rasio kemandirian, dan derajat desentralisasi akan menunjukkan apakah keuangan daerah mampu mandiri atau masih didominasi bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan di bidang pariwisata pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio ketergantungan, rasio kemandirian, dan derajat desentralisasi. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul : **“Analisis Tingkat Ketergantungan, Kemandirian, dan Desentralisasi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Yang Mengalami Peningkatan Pariwisata Tahun 2017-2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dan dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana tingkat desentralisasi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat ketergantungan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi.
2. Untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi.
3. Untuk menganalisis tingkat desentralisasi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi.
4. Untuk mengetahui tingkat perbandingan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberi informasi yang berguna bagi penulis, pemerintah daerah, dan pihak lain yang membaca. Adapun manfaat yang penulis harapkan yaitu:

1. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk mengembangkan dan membandingkan teori dan ilmu yang penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan dengan permasalahan yang sebenarnya terjadi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya. Dengan penelitian ini penulis lebih

mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat dan mengetahui bagaimana pengaruh pariwisata yang ada di daerah tersebut terhadap perkembangan PAD daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi dan masukan serta acuan untuk menganalisis rasio ketergantungan, kemandirian, dan desentralisasi keuangan daerah sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan dan mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi pihak lain

Sebagai bahan dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai rasio ketergantungan, kemandirian, dan desentralisasi keuangan daerah pemerintah daerah dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi pada tahun 2017-2021 berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu kelima kabupaten/kota tersebut memiliki tingkat ketergantungan keuangan daerah yang masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat, artinya pemerintah daerah belum mampu memaksimalkan pendapatan daerahnya sendiri dan masih sangat mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat (bantuan eksternal) yaitu pendapatan transfer untuk pembangunan daerah.
2. Kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi pada tahun 2017-2021 berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yaitu kelima kabupaten/kota tersebut membentuk pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan daripada peran pemerintah daerah atau termasuk dalam daerah yang belum mampu menjalankan otonomi daerahnya dengan kemampuan pendapatan keuangan daerahnya sendiri dalam kegiatan pemerintahan.

3. Kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi pada tahun 2017-2021 berdasarkan derajat desentralisasi yaitu diantara kelima kabupaten/kota tersebut Kota Bukittinggi masih lebih baik dibandingkan dengan keempat kabupaten lainnya, karena Kota Bukittinggi berdasarkan derajat desentralisasi masih lebih baik dalam menjalankan otonomi daerahnya dengan kemampuan keuangan daerahnya sendiri meskipun masih dalam kategori kurang, sedangkan Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, dan Kab. Dharmasraya termasuk kategori sangat kurang dalam menjalankan otonomi daerahnya dengan kemampuan keuangan daerahnya sendiri.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman dalam melakukan penelitian ini yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, meskipun penelitian ini menarik untuk dilakukan karena adanya dampak dari pandemi covid-19 pada tahun 2019-sekarang yang tentunya mempengaruhi wisatawan dan keuangan daerah. Akan tetapi, PAD kurang baik dikelola oleh pemerintah dan menyebabkan fluktuatifnya pendapatan daerah meskipun pariwisata di daerah tersebut sangat diminati oleh wisatawan. Oleh karena itu, diharapkan kepada peneliti berikutnya dapat menjadi perhatian dan lebih menyempurnakan penelitian ini karena penelitian ini tentunya masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki.

C. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi harus mampu lebih mengoptimalkan dan mengembangkan potensi daerah masing-masing terlebih dalam bidang pariwisatanya karena sama-sama kita ketahui bahwa setiap daerah pada kabupaten/kota tersebut sangat diminati dan dipenuhi pengunjung setiap tahunnya.
2. Pemerintah Daerah Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi dituntut agar bisa mengelola sumber pendapatan yang ada agar terealisasikan dengan baik seperti sumber pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.
3. Pemerintah Daerah Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi sangat harus memperhatikan dan memikirkan bagaimana caranya agar daerahnya mampu mandiri tanpa terlalu bergantung kepada pemerintah pusat dalam mengelola otonomi daerahnya dengan mengandalkan pendapatan daerahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, I. D. 2013. *Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 3, No.1.
- Antara Sumbar. Sekilas Tentang Sejarah Kabupaten Limapuluh Kota. <https://sumbar.antaraneews.com/berita/201954/sekilas-tentang-sejarah-kabupaten-limapuluh-kota>. Diakses 31 Juli 2022 21:16 pm.
- Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2017. *Otonomi Daerah Esensi, Tujuan Dan Manfaatnya Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. BKPSDMD : Pangkal Pinang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2022. *Kunjungan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (orang), 2017-2021*. <https://sumbar.bps.go.id/indicator/16/312/1/kunjungan-wisatawan-nusantara-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>. Diakses 19 Juni 2022 02:43 pm.
- Bapenda. 2015. *Jangan Lupakan Sektor Pariwisata Sebagai Sumber PAD*. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2015/11/02/jangan-lupakan-sektor-pariwisata-sebagai-sumber-pad/>. Diakses 12 Juni 2022 20:47 pm.
- Bastian, Indra. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE
- BKPSDM. Visi dan Misi. <https://bkpsdm.limapuluhkotakab.go.id/>. Diakses 31 Juli 2022 21:52 pm.
- Delano, A. 2020. *Analisis Rasio Kemandirian Dan Desentralisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Dan Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018*. Tugas Akhir. Universitas Negeri Padang : Padang.
- Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumbar. 2014. *Rencana Strategis Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumbar Tahun 2014-2015*. Dinas Parekraf Prov. Sumbar : Padang.
- Fahmi, I. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta : Bandung.
- Fathah, R. N. 2017. *Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal EBBANK, Vol. 8, No. 1.